

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelabuhan Perikanan

Samudera Nizam Zachman Jakarta

Dasar Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Hukum didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan
Entitas dan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi
Rencana dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Menteri Kelautan dan
Strategis Perikanan nomor : 20/PERMEN-KP/2014, berkedudukan di Jalan Tuna
Raya No. 1 Muara Baru Ujung, Penjaringan – Jakarta Utara.

Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta berkomitmen dengan visi ***“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;

- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penertiban Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- m. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah melakukan revisi ke 9 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pemblokiran anggaran, pembukaan blokir anggaran dan penyesuaian halaman III DIPA. Perubahan tersebut membuat sebagian akun pagu menjadi bertambah dan ada yang berkurang dikarenakan blokir pagu. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai Tusi	26.775.000	26.775.000
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	27.649.620.000	27.649.620.000
Pendapatan Jasa Lainnya	0	-
Jumlah Pendapatan	27.676.395.000	27.676.395.000
Belanja		
Belanja Pegawai	11.545.741.000	13.290.575.000
Belanja Barang	21.605.236.000	22.202.048.000
Belanja Modal	10.630.744.000	10.877.817.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	43.781.721.000	46.370.440.000

Realisasi

Pendapatan

Rp35.385.689.266

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp35.385.689.266 atau mencapai 127,86 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp27.676.395.000. Pendapatan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta terdiri dari Pendapatan Jasa, Pendapatan Jasa Lainnya dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	35.794.407	
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan tusi	26.775.000	235.724.672	880,39
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	27.649.620.000	34.947.271.187	126,39
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	13.970.000	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	140.529.000	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	12.400.000	-
Jumlah	27.676.395.000	35.385.689.266	127,86

Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2025 lebih rendah 11,07% dibandingkan TA 2024. Hal tersebut dikarenakan aktivitas di Pelabuhan sedikit berkurang karena dampak efisiensi anggaran dan pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur/Pasca Produksi yang mengharuskan mendaratkan ikan sesuai dengan wilayah tangkapan.

Pendapatan PNBPN terbesar adalah Jasa Pelabuhan Perikanan sebesar 34,9 Miliar Rupiah yang merupakan Akun PNBPN yang terdiri atas beberapa jasa seperti jasa pas masuk, jasa tambat labuh, jasa kebersihan kolam, jasa kebersihan Kawasan dan jasa listrik.

Penerimaan kembali belanja modal TAYL merupakan penerimaan yang berasal dari kelebihan pembayaran atas belanja modal TA 2024 pada LHP BPK RI atas LK KKP TA 2024.

Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah adalah potongan SPM atas pekerjaan command center TA 2024.

Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin dan pemindahtanganan BMN lainnya merupakan hasil penerimaan atas lelang BMN yang dilakukan oleh PPS Nizam Zachman Jakarta bersama dengan KPKNL Jakarta II.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	140.529.000	64.708.813	117,17
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.400.000	36.835.000	-66,34
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan tusi	235.724.672	306.404.288	-23,07
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	34.947.271.187	39.348.917.406	-11,19
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	13.970.000	981.685	1323,06
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	30.000.000	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	3.075.887	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	18.035	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	35.794.407	-	#DIV/0!
Jumlah	35.385.689.266	39.790.941.114	-11,07

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Negara

Rp33.754.615.604

Realisasi Belanja instansi pada Tahunan TA 2025 adalah sebesar Rp33.754.615.604 atau 72,79% dari anggaran belanja sebesar Rp46.370.440.000. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp12.665.619.812 atau 95,30% dari pagu anggaran sebesar Rp13.290.575.000 Belanja Barang sebesar Rp17.768.118.524 atau 80,03% dari pagu anggaran sebesar Rp22.202.048.000 dan Belanja Modal sebesar Rp3.321.704.076 atau 30,54% dari pagu anggaran Rp10.877.817.000. Total Realisasi Belanja Kotor sebesar Rp33.755.442.412 atau 72,79% adapun pengembalian belanja sebesar Rp826.808, jadi Total Realisasi Belanja bersih sebesar Rp Rp33.754.615.604.

Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	13.290.575.000	12.665.619.812	95,30
Belanja Barang	22.202.048.000	17.768.118.524	80,03
Belanja Modal	10.877.817.000	3.321.704.076	30,54
Total Belanja Kotor	46.370.440.000	33.755.442.412	72,80
Pengembalian		(826.808)	-
Jumlah	46.370.440.000	33.754.615.604	72,79

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12.665.619.812	10.914.291.883	16,05
Belanja Barang	17.768.118.524	23.649.107.601	(24,87)
Belanja Modal	3.321.704.076	7.308.688.647	(54,55)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Kotor	33.755.442.412	41.872.088.131	(19,38)
Pengembalian Belanja	826.808	21.670.194	(96,18)
Jumlah Bersih	33.754.615.604	41.850.417.937	(19,34)

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp12.665.619.812

Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.665.619.812 dan Rp10.914.291.883. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS & PPPK	6.503.736.679	5.541.097.566	17,37
Belanja Gaji & Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Khusus	5.765.206.133	5.108.623.317	12,85
Belanja Lembur	396.677.000	264.571.000	49,93
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	12.665.619.812	10.914.291.883	16,05
Pengembalian Belanja Pegawai	(740.599)	(7.752.479)	
Jumlah Belanja	12.664.879.213	10.906.539.404	16,12

Belanja Barang

Rp17.768.032.315

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.768.032.315 dan Rp23.635.189.886. Realisasi Belanja Barang TA 2025 lebih kecil 15,43% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	8.657.435.308	8.547.927.276	1,28
Belanja Barang Non Operasional	292.665.158	1.008.457.719	(70,98)
Belanja Jasa	6.718.266.424	8.040.809.038	(16,45)
Belanja Persediaan	197.233.080	479.133.438	(58,84)
Belanja Pemeliharaan	1.409.262.773	4.139.669.080	(65,96)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	493.255.781	1.433.111.050	(65,58)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	17.768.118.524	23.649.107.601	(24,87)
Pengembalian Belanja	(86.209)	(13.917.715)	
Jumlah Belanja	17.768.032.315	23.635.189.886	(24,82)

Belanja Modal

Rp3.321.704.076

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.321.704.076 dan Rp7.308.688.647. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 dibandingkan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 54,55% disebabkan karena adanya

Efisiensi Anggaran pada Tahun 2025 yang memblokir seluruh belanja modal pada awal tahun 2025 dan baru terdapat pembukaan blokir untuk belanja di akhir tahun sehingga realisasi menjadi terbatas untuk belanja modal yang dapat dilaksanakan dalam waktu 1 bulan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.282.676.476	5.902.147.391	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.027.600	1.406.541.256	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	3.321.704.076	7.308.688.647	-
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	3.321.704.076	7.308.688.647	-54,55

Adapun rincian penambahan belanja modal adalah sebagai berikut :

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan maupun pengurangan tanah.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp3.282.676.476, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.902.147.391. Hal ini disebabkan adanya blokir pagu belanja modal karena efisiensi anggaran di awal tahun 2025 dan baru terdapat pembukaan blokir untuk belanja di akhir tahun sehingga realisasi menjadi terbatas untuk belanja modal yang dapat dilaksanakan dalam waktu 1 bulan.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp39.027.600 dan Rp1.406.541.256. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi TA 2024 dikarenakan adanya blokir pagu belanja modal karena efisiensi anggaran di awal tahun 2025 dan baru terdapat pembukaan blokir untuk belanja di akhir tahun sehingga sudah waktu yang tersisa tidak cukup untuk realisasi belanja modal Gedung dan bangunan yang membutuhkan waktu serta perencanaan yang lebih panjang.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belum ada belanja modal lainnya yang dilakukan pada tahun anggaran 2025.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi pada TA 2025 tidak terdapat perubahan dibandingkan TA 2024 karena tidak ada alokasi anggaran pada pos ini.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Rekening Kas Negara setiap akhir tahun, sehingga tidak ada saldo pada kas di bendahara pengeluaran per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	-	-
Kwitansi Belum di SPM GU kan	-	-
Bank MANDIRI	-	-
Jumlah	-	-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Setara Kas Rp0 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas yaitu kas lainnya di luar UP/TUP seperti potongan pajak pada belanja yang belum disetorkan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB **C. 4. Piutang PNB**

Rp100.882.359 Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp100.882.359 dan Rp194.139.912. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang tersebut merupakan piutang atas Jasa Pelabuhan Perikanan berupa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam, serta piutang atas tagihan jasa listrik, jasa gedung bangunan dan jasa kebersihan. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan (Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam)	23.684.194	84.103.411
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan (Kebersihan Pelabuhan dan Unit Pengolahan Limbah)	74.241.095	74.241.095
Penerimaan kembali Belanja TAYL	2.957.070	35.794.406
Jumlah	100.882.359	194.138.912

Saldo Piutang PNBP PPS Nizam Zachman Jakarta per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp100.882.359 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

a. Piutang atas Pendapatan Pelabuhan Perikanan senilai Rp158.344.506 pada TA 2024 telah berprogress dengan sisa nilai piutang Rp100.882.359 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Senilai Rp68.210.375 yang merupakan piutang atas temuan pada LHA dari Tim Inspektorat Jenderal II KKP terkait Penerimaan yang masih harus diterima atas kekurangan bayar dan denda dari Jasa Tambat Labuh Tahun 2019 s.d. 2020 dan telah dibayarkan pada TA 2025 senilai Rp55.113.798 sehingga sisa piutang menjadi Rp13.096.577.
- 2) Piutang atas jasa kebersihan Kawasan dan unit pengolahan limbah pada tahun 2021 yang masih belum dibayarkan senilai Rp31.080.000 belum terdapat progres pembayaran pada tahun 2025.
- 3) Sebesar Rp59.054.131 merupakan nilai Piutang yang sudah berprogres sampai dengan TA 2024 yang awalnya terbentuk atas rekomendasi BPK RI pada LHP BPK RI tahun 2021 terkait potensi penerimaan Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam TA 2019 s.d. 2020 dan progres di tahun 2025 sebagai berikut :
 - a. Terdapat pembayaran pada TA 2025 senilai Rp5.305.419 sehingga sisa piutang menjadi senilai Rp53.748.712.

b. Piutang lainnya senilai Rp2.957.070 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa Uang Makan, Uang Lembur dan Beban Perjalanan Dinas yang telah disetorkan seluruhnya di tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kelebihan Bayar Uang Makan PNS pada NTPN 8114155DFRK3TR2R senilai Rp316.050
- 2) Kelebihan Bayar Uang Makan PPPK pada NTPN 2CA703CIG6FB3RDN senilai Rp105.150
- 3) Kelebihan Bayar Uang Lembur PNS pada NTPN 1E2A23CIG6FB3PHN senilai Rp491.150
- 4) Kelebihan Bayar Uang Lembur PPPK pada NTPN 1ACA52G50BSUMRQG senilai Rp838.000
- 5) Kelebihan Bayar Uang Lembur PPPK Paruh waktu pada NTPN 39A283CIG6FB3S6N senilai Rp1.190.000
- 6) Kelebihan Bayar Beban Perjalanan Dinas pada NTPN EE7171JNGHAIA3HV senilai Rp16.720

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Nama	TH 2020	TH 2019
1			
2			

Bagian Lancar

TPA

Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2025 dan 2024

No	Nama	TH 2020	TH 2019
1			
2			
Jumlah		-	-

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

Rp(97.940.075)

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(97.940.075) dan Rp(158.523.478) Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	2.957.070	0,5%	14.786
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	97.925.289	100%	97.925.289
Jumlah	100.882.359		97.940.075
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	100.882.359		97.940.075

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2020	TH 2019
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp18.551.346.307

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp18.551.346.307 dan Rp15.557.982.617. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan TUSI	-	-
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	18.551.346.307	15.557.982.617
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-
Jumlah	18.551.346.307	15.557.982.617

PYMHD Tahun 2025 terdiri dari Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam atas kapal perikanan dan non-perikanan (SPOB) yang masih berada di kolam Pelabuhan per 31 Desember 2025 dan diperhitungkan

potensi penerimaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 serta rekomendasi atas temuan BPK dalam LHP BPK RI nomor 15b/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 terkait dengan perhitungan PYMHD dengan rincian sebagai berikut :

1. Terhadap 25 kapal dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan KKP TA 2022 dengan nilai temuan sebesar Rp3.606.961.957,00 telah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pemilik/pengurus kapal sehingga terdapat progres tindaklanjut nilai PYMHD menjadi senilai Rp2.863.153.140,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Sebanyak 4 Kapal masih berada di Kolam Pelabuhan dan kapal dalam kondisi rusak serta tidak layak melaut dengan potensi PYMHD sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp2.560.896.967,00;
- b) Sebanyak 5 Kapal keluar kolam Pelabuhan tanpa lapor dan menerbitkan SPB dan diketahui kapal-kapal tersebut keluar saat sea trial menggunakan SKPSPB lalu tidak kembali lagi ke kolam Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta dan berada di PP. Muara Angke sejak tanggal 2 Juni 2020, sehingga diperhitungkan potensi PYMHD atas 5 kapal tersebut sampai dengan penerbitan SKPSPB tanggal 31 Mei 2020 senilai Rp264.071.076;
- c) Terhadap 16 kapal yang telah menerbitkan SPB di tahun 2021 yang seharusnya tidak berada di kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta namun terdapat dalam absensi kapal per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - i. Sebanyak 3 Kapal berada di PP. Muara Angke dibuktikan dengan STBLK Kedatangan di PP. Muara Angke dan pemilik kapal menyatakan pada 31 Desember 2021 tidak berada di

kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sehingga tidak terdapat nilai PYMHD;

- ii. Sebanyak 2 Kapal menyatakan berada di Fishing Ground dan tidak berada dalam kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada 31 Desember 2021 sehingga tidak terdapat nilai PYMHD;
- iii. Sebanyak 1 Kapal (Tri Wijaya Makmur) menyatakan telat melaporkan kedatangan kapal sehingga kapal sehingga kapal terdata dalam absensi pada akhir tahun 2021 namun pemilik kapal sudah melaporkan kedatangan sebenarnya dan menyelesaikan seluruh pembayaran sehingga tidak terdapat lagi potensi PYMHD pada 31 Desember 2025 atas aktivitas tersebut;
- iv. Sebanyak 9 Kapal memberikan klarifikasi bahwa kapal mereka memang berada di kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada akhir tahun 2021 untuk keperluan tertentu selama beberapa hari namun tidak melaporkan kedatangan maupun kepergian kapal dari kolam sehingga terdapat potensi PYMHD senilai Rp3.129.300,00;
- v. Sebanyak 1 Kapal (Sungai Rokan 12) masih belum memberikan konfirmasi terkait dengan keberadaan kapalnya pada akhir tahun 2021 akan tetapi berdasarkan dokumen STBLKK tahun 2022 di PPS Nizam Zachman Jakarta diketahui kapal tersebut menerbitkan SPB dari PP. Muara Angke ke Fishing Ground pada tanggal 22 Desember 2021 sehingga potensi PYMHD kapal tersebut sementara dihitung sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 (1 hari sebelum SPB) senilai Rp35.055.797,00 namun nilai tersebut masih dapat berubah berdasarkan dengan konfirmasi/klarifikasi dari pemilik kapal yang akan ditindaklanjuti di Tahun 2026.

2. Sebanyak 594 Kapal Perikanan berada di kolam Pelabuhan per 31 Desember 2025 dengan nilai PYMHD atas Jasa Tambat Labuh sebesar Rp14.132.784.592 dan Jasa Kebersihan Kolam sebesar Rp1.364.928.295 dengan keterangan khusus atas beberapa kapal terdapat perubahan nilai atas 9 kapal yaitu :

- a) 1 Kapal (Trio Cahaya Makmur) terdapat pembayaran di Tahun 2025 yang belum diperhitungkan dalam perhitungan PYMHD Unaudited atas pembayaran sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp21.454.080, sehingga nilai PYMHD kapal tersebut yang sebelumnya Rp73.313.280 menjadi Rp51.859.200,00;
- b) 1 Kapal (Harmonis) berganti nama dan selar menjadi Usaha Jaya 89 dan kapal tersebut sudah menerbitkan SPB dan keluar kolam Pelabuhan pada 8 Februari 2025 serta telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sehingga PYMHD kapal tersebut yang sebelumnya Rp25.833.000 menjadi Rp0;
- c) 1 Kapal (Muncul Lestari Jaya) diketahui tenggelam pada tanggal 9 Juli 2025 dan dipindahkan keluar kolam pelabuhan pada tanggal 11 Juli 2025 namun belum menyelesaikan pembayaran sehingga nilai PYMHD kapal tersebut yang sebelumnya diperhitungkan sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp161.369.892 berubah menjadi Rp148.633.632,00;
- d) 3 Kapal sudah keluar kolam Pelabuhan tanpa menerbitkan SPB yaitu Makin Jaya, Jaya Sukses Kapalindo 18 dan Samuel 1 yang terdeteksi berada di Pelabuhan lain. PYMHD sebelumnya dihitung sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp192.525.585 berubah menjadi Rp22.575.850 karena PYMHD dihitung ulang dengan titik akhir tagihan sampai dengan kapal tersebut berlabuh di Pelabuhan lain.
- e) 3 Kapal sudah keluar kolam Pelabuhan tanpa menerbitkan SPB namun belum dapat ditemukan keberadaan kapalnya yaitu Timur Jaya – 2, Utama 8 dan Gabungan Jaya Abadi dan masih

dalam proses penelusuran serta proses konfirmasi kepada pemilik kapal terkait sehingga PYMHD yang tercatat masih menggunakan tanggal akhir per 31 Desember 2025 sampai dengan diketahui tanggal aktual kapal keluar kolam Pelabuhan.

3. Sebanyak 7 Kapal non Perikanan (SPOB) memiliki PYMHD atas Jasa Tambat Labuh senilai Rp140.489.680;
4. Sebanyak 8 Kapal non Perikanan (SPOB) memiliki PYMHD atas Jasa Kebersihan Kolam senilai Rp49.990.600.
5. Dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan KKP TA 2022, terdapat 54 kapal yang diidentifikasi sebagai kapal mangkrak / dalam kondisi rusak / tidak beroperasi dengan beberapa kondisi sebagai berikut :
 - a) Sebanyak 13 Kapal telah diperhitungkan dan tercatat dalam PYMHD per 31 Desember 2025 (594 Kapal);
 - b) Sebanyak 3 Kapal telah termasuk dalam temuan BPK pada poin 1 dan potensi PYMHD telah diperhitungkan pada poin 1;
 - c) Sebanyak 6 Kapal telah keluar kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya;
 - d) Sebanyak 1 Kapal merupakan kapal tanpa identitas yang kemudian diketahui kapal tersebut merupakan kapal sitaan dari Kejaksaan RI;
 - e) Sebanyak 3 Kapal tidak memiliki identitas dan tidak diketahui pemiliknya. Telah dilakukan pengumuman untuk pemilik kapal melaporkan kepemilikan kapal tersebut namun tidak terdapat pemilik yang melaporkan kepemilikan kapal-kapal tersebut. Tindak lanjut yang akan dilakukan PPS Nizam Zachman adalah mengatur kapal-kapal tersebut agar tidak mengganggu operasional kolam Pelabuhan sesuai dengan Petunjuk Teknis Dirjen Perikanan Tangkap nomor 49 Tahun 2024;

- f) Sebanyak 6 Kapal tidak dapat dihitung potensi PYMHDnya karena kekurangan data ukuran kapal yaitu Length Overall (LoA);
- g) Sebanyak 22 Kapal terdapat data ukuran kapal namun tidak ditemukan dokumen STBLK Kedatangannya karena kapal-kapal tersebut masuk ke kolam Pelabuhan pada saat pengelolaan Tambat dan Labuh masih dikelola oleh PT. Perikanan Indonesia. Potensi PYMHD atas kapal-kapal tersebut diperhitungkan sejak 15 Oktober 2019 saat peralihan pengelolaan Tambat Labuh dari PT. Perikanan Indonesia ke PPS Nizam Zachman Jakarta yang dijelaskan lebih lanjut dalam pengungkapan lainnya.

Terhadap 594 kapal perikanan, 8 kapal non perikanan, serta temuan PYMHD pada LHP BPK RI atas LK KKP TA 2022 dapat dijabarkan ke dalam tabel sebagai berikut :

No	Jumlah Kapal	Nilai PYMHD	Keterangan
1	4	2.560.896.967	PYMHD LHP BPK RI LK TA 2022 (Bagian hasil konfirmasi temuan senilai Rp3.606.961.957 yang masih berada di Kolam Pelabuhan)
2	5	264.071.076	PYMHD LHP BPK RI LK TA 2022 (Bagian hasil konfirmasi temuan senilai Rp3.606.961.957 yang sudah tidak berada di Kolam Pelabuhan)
3	16	38.185.097	PYMHD LHP BPK RI LK TA 2022 (Bagian hasil temuan senilai Rp3.606.961.957 atas kapal SPB yang terdapat dalam absensi kolam akhir tahun 2021 dan telah dilakukan konfirmasi dengan pemilik kapal kecuali 1 Kapal (Sungai Rokan 12) yang belum memberikan konfirmasi/klarifikasi)
4	594	15.497.712.888	PYMHD Kapal Perikanan yang dihitung per 31 Desember 2025 berdasarkan dokumen kedatangan kapal dan belum ada dokumen SPB yang didukung dengan dokumentasi kapal
5	8	190.480.280	PYMHD Kapal Non Perikanan (SPOB) yang berasal dari tagihan bulan Desember 2025 (Tambat SPOB berdasarkan penjualan SPOB dan Kebersihan Kolam SPOB)
Total	627	18.551.346.308	

6. Dari 627 Kapal dalam tabel PYMHD di atas, PPS Nizam Zachman Jakarta telah melakukan klasifikasi terhadap kapal-kapal tersebut. Sebanyak 86 Kapal senilai Rp13.705.832.459 merupakan kapal yang sudah memiliki potensi PYMHD Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam lebih dari 1 tahun (Kapal masuk kolam sejak 2024 kebawah) dan izin kapal perikanan (SIPI) sudah tidak aktif sejak tahun 2025. Dari 86 kapal tersebut, teridentifikasi fisik kapal sudah rusak sebanyak 24 kapal senilai Rp6.950.455.376.

Terdapat kendala dalam penyelesaian PYMHD yang sudah terakumulasi selama lebih dari satu tahun tersebut dikarenakan berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh para pemilik kapal tidak sanggup untuk menyelesaikan kewajiban tambat labuh dan kebersihan kolam atas kapal tersebut yang sudah semakin besar sedangkan kapalnya sudah rusak dan tidak dapat dioperasikan. Selain itu juga, peraturan terkait saat ini yaitu Kepdirjen Perikanan Tangkap nomor 45 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Kapal Tidak Beroperasi di Pelabuhan Perikanan yang saat ini menjadi juknis pengelolaan kapal tidak beroperasi di Pelabuhan Perikanan belum mengakomodir permasalahan ini secara keseluruhan dan memadai dikarenakan dalam juknis tersebut belum mengatur bagaimana tindak lanjut setelah kapal sudah dinyatakan mangkrak atau tidak beroperasi dalam kolam Pelabuhan.

C.10 Persediaan

Persediaan

Rp129.440.548

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp129.440.548 dan Rp147.790.256.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	129.440.548	147.790.256
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	129.440.548	147.790.256

Tagihan TP/TGR Rp0 C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
	Jumlah	-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2025 dan 2024

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp1.784.632.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.784.632.000 dan Rp1.784.632.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.784.632.000
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Barang Berlebih	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2025	1.784.632.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	250 m2	Perumahan DPR Pulo Gebang Jl. Cengkeh D1/16 Jakarta Timur	1.784.632.000
Jumlah			1.784.632.000

Peralatan dan

Mesin

Rp93.520.877.231

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp93.520.877.231 dan Rp92.544.076.555. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	92.544.076.555
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	92.544.076.555
Pembelian	3.282.676.476
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0
Pengembangan Nilai Aset	95.826.753.031
Transfer Masuk	38.602.700
Reklasifikasi Masuk	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	-
Penghentian dari penggunaan	2.344.478.500
Saldo per 31 Desember 2025	93.520.877.231
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(78.466.953.912)
Saldo per 31 Desember 2025	15.053.923.319

*Gedung dan
Bangunan
Rp81.543.009.007*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp81.543.009.007 dan Rp81.040.643.027. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	81.040.643.027
Mutasi tambah:	
Pembelian	39.027.600
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
Transfer Masuk	463.338.380
Mutasi kurang:	-
Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN yg Tidak di Temukan	-
Koreksi Pencatatan	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah dihentikan	-
Saldo per 31 Desember 2025	81.543.009.007
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(16.318.295.408)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	65.224.713.599

*Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp135.058.934.8
82*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp135.058.934.882 dan Rp134.017.823.804. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	134.017.823.804
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	1.041.111.078
Mutasi kurang:	-
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN yang Tidak di Temukan	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	135.058.934.882
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(84.526.953.170)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	50.531.981.712

Aset Tetap

Lainnya

Rp0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap untuk Tahun 2025, terlampir sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
- Aset Tetap Renovasi	0
Mutasi kurang:	0
-	0
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp65.351.250

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp65.351.250 dan Rp65.351.250. KDP pada tahun 2025 merupakan konsultan perencanaan rehabilitasi bangunan gerbang pas masuk pelabuhan di tahun 2024 yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025 namun belum dapat terlaksana dikarenakan efisiensi anggaran tahun 2025 dan direncanakan untuk dilanjutkan pada tahun 2026 serta telah masuk ke dalam Pagu definitif tahun anggaran 2026.

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

Rp(179.312.202.49

0)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(179.312.202.490) dan Rp(160.502.195.926). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama

masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	93.520.877.231	78.466.953.912	15.053.923.319
2	Gedung dan Bangunan	81.543.009.007	16.318.295.408	65.224.713.599
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.058.934.882	84.526.953.170	50.531.981.712
4	KDP	65.351.250	0	65.351.250
Akumulasi Penyusutan		310.188.172.370	179.312.202.490	130.875.969.880

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Properti

Investasi

Rp14.088.113.79

5

C.21 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp14.088.113.795 dan Rp0.

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Mutasi transaksi terhadap Properti Investasi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	14.088.113.795
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	14.088.113.795
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(3.286.912.370)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	10.801.201.425

Aset Tak
Berwujud
Rp200.647.000

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp200.647.000 dan Rp200.647.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta berupa *software (aplikasi)* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	200.647.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	200.647.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(169.761.250)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	30.885.750

Aset Lain-Lain
Rp52.286.820.644
4

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp52.286.820.644 dan Rp53.763.402.644. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	53.763.402.644
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	244.478.500
Mutasi kurang:	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN	1.721.060.500
Saldo per 31 Desember 2025	52.286.820.644
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(35.298.443.725)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	16.988.376.919

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Dana Yang

Dibatasi

Penggunaannya

Rp253.746.000

C.24 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp253.746.000 dan Rp1.561.797.030. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan transaksi RPATA untuk pekerjaan yang selesai lebih dari tanggal 23 Desember 2025 dan dibayarkan di tahun 2026 sehingga dibuat tampungan dananya dalam bentuk dana yang dibatasi penggunaannya.

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya

Rp(35.468.204.975)

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(35.468.204.975) dan Rp(36.123.089.403). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	52.286.820.644	35.298.443.725	16.988.376.919
Akumulasi Amortisasi Software	200.647.000	169.761.250	30.885.750
Jumlah	52.487.467.644	35.468.204.975	17.019.262.669

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp227.944.800 dan Rp2.136.409.258. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember adalah masing-masing sebesar Rp95.577.901 dan Rp97.538.947. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan

yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Terdapat 13 Perusahaan yang berkontrak dengan PPS Nizam Zachman Jakarta untuk Penggunaan Bangunan Permanen di Kawasan Pelabuhan Perikanan dengan periode kontrak setahun atau lebih yang masa habis kontraknya melewati tahun 2025 dengan nilai pendapatan diterima di muka senilai Rp95.577.901.

Rincian Pendapatan diterima di Muka

Uraian	Jumlah
Pendapatan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi (Pemeliharaan Prasarana dan Sarana)	3.872.442
Pendapatan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi (Penggunaan Gedung Bangunan)	54.530.013
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan (Kebersihan Kawasan Pelabuhan)	37.175.446
Total	95.577.901

Utang Yang

Belum

Ditagihkan Rp0

C.29 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TH 2025	TH 2024
Utang yang Belum Ditagihkan	0	0
Jumlah	0	0

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0*

C.30 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Utang yang masih belum diselesaikan pembayarannya di luar utang kepada pihak ketiga dan utang yang belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp179.095.018.412*

C.31 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp179.095.018.412 dan Rp184.049.852.422. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp38.134.862.858

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.134.862.858 dan Rp37.139.680.371. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Anggaran lain-lain	0	30.000.000	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan tusi	234.151.047	319.862.474	(26,80)
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	37.886.741.811	36.788.836.212	2,98
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	13.970.000	981.685	1.323,06
Jumlah	38.134.862.858	37.140.295.516	2,68

Pendapatan TA 2025 mengalami sedikit peningkatan dan tidak signifikan sebesar 2,68% dari tahun sebelumnya disebabkan karena aktifitas kapal perikanan mengalami sedikit penurunan di tahun 2025 akibat adanya aturan kuota pada penangkapana ikan terukur (PIT) yang mewajibkan kapal mendaratkan ikan sesuai zonasi kapal tersebut menangkap ikan sehingga penerimaan tambat labuh dan pas masuk mengalami sedikit penurunan dan terdapat jurnal PYMHD yang meningkatkan akrual pendapatan dalam LO.

Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan sebesar 37,8 Miliar Rupiah merupakan Akun PNBP yang terdiri atas beberapa jasa seperti jasa pas masuk, jasa tambat labuh, jasa kebersihan kolam, jasa penggunaan listrik dari instalasi pelabuhan dan jasa kebersihan Kawasan.

Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah merupakan denda atas keterlambatan pekerjaan pembangunan command centre TA 2024 yang dibayar melalui mekanisme RPATA.

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp12.564.758.863

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.564.758.863 dan Rp11.004.909.404. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	6.404.204.880	5.632.962.450	13,69
Beban Tunjangan-tunjangan	5.765.206.133	5.107.375.954	12,88
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	395.347.850	264.571.000	49,43
Jumlah	12.564.758.863	11.004.909.404	14,17

Beban Persediaan D.3 Beban Persediaan

Rp204.242.788

Jumlah Beban Persediaan pada Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp204.242.788 dan Rp499.766.269. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	204.242.788	499.766.269	-59,13
Beban Persediaan bahan baku	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	204.242.788	499.766.269	-59,13

*Beban Barang
dan Jasa
Rp15.165.133.462*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.165.133.462 dan Rp17.801.151.693. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN KEGIATAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	8.236.073.023	7.955.830.299	3,52
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	16.729.000	137.498.000	(87,83)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	166.560.000	138.210.800	20,51
Beban Barang Operasional Lainnya	211.083.285	335.161.920	(37,02)
Beban Bahan	265.242.758	841.559.219	(68,48)
Beban Honor Ouput Kegiatan	11.450.000	165.400.000	(93,08)
Beban Langganan Listrik	1.294.211.435	1.621.777.746	(20,20)
Beban Langganan Telepon	1.332.000	1.222.000	9,00
Beban Langganan Air	516.818.397	568.944.126	(9,16)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.950.183.170	2.274.754.981	29,69
Beban Jasa Konsultan	0	65.351.250	(100,00)
Beban Sewa	289.800.000	341.126.000	(15,05)
Beban Jasa Profesi	3.600.000	14.400.000	(75,00)
Beban Jasa Lainnya	1.186.077.994	3.339.915.352	(64,49)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	15.972.400	0	#DIV/0!
Jumlah	15.165.133.462	17.801.151.693	(14,81)

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.409.176.564*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.409.176.564 dan Rp4.139.669.080. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	261.184.900	1.132.332.072	(76,93)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.040.160.253	2.848.859.764	(63,49)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	24.286.700	(100,00)
Beban Pemeliharaan Irigasi	0	26.851.344	(100,0)
Beban Pemeliharaan Jaringan	107.831.411	107.339.200	0,46
Beban Persediaan Suku Cadangan	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	1.409.176.564	4.139.669.080	(65,96)

Beban Perjalanan **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Dinas

Rp493.239.061

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp493.239.061 dan Rp1.427.718.092. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024
Beban Perjalanan Biasa	427.949.061	1.195.648.565
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.130.000	109.750.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.160.000	41.425.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	80.894.527
Beban Perjalanan Biasa - Luar negeri	0	0
Jumlah	493.239.061	1.427.718.092

**Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2022 tidak ada alokasi anggarannya. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

**Beban Bantuan
Sosial Rp0**

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp12.062.475.982

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.062.475.982 dan Rp13.062.574.809. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.792.766.065	4.419.855.603	8,44
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.869.440.883	1.849.817.890	1,06
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	4.183.698.548	5.408.668.795	(22,65)
Beban Penyusutan Properti Investasi	388.122.914	388.122.914	-
Jumlah Penyusutan	11.234.028.410	12.066.465.202	(6,90)
Beban Amortisasi Software	30.126.125	39.661.750	(24,04)
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasional	798.321.447	956.447.857	(16,53)
Jumlah Amortisasi	828.447.572	996.109.607	(16,83)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	12.062.475.982	13.062.574.809	(7,66)

Beban Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

Rp(57.412.951)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(57.412.951) dan Rp(7.925.208). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-57.427.737	-7.746.236	641,36
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	14.786	-178.972	-
Jumlah	-57.412.951	-7.925.208	-

Defisit dari

Pelepasan Aset

Non Lancar

Rp152.929.000

D.11 Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Pelepasan Aset Non Lancar dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pelepasan atau penjualan aset non lancar milik Negara. Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH 2024	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	140.529.000	64.708.813	117,17
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.400.000	36.835.000	(66,34)
Beban dari Pelepasan Aset Non Lancar	-	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	152.929.000	101.543.813	50,60

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional

Rp(11.340.000)

D.12 Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	3.075.887	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	18.035	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Rusak/Usang	11.340.000	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	11.340.000	3.093.922	266,53

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa

D.13 Pos Luar Biasa

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Jumlah	0	0	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp184.049.852.422

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp184.049.852.422 dan Rp192.503.980.247.

Defisit LO

Rp(3.706.750.911)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(3.706.750.911) dan Rp(10.618.552.727). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Jumlah	-

Koreksi Atas

Reklasifikasi Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan. Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp62.216.554.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp (17.157.436.450).

Koreksi Nilai Aset

Tetap/Lainnya

Non Revaluasi Rp1

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	1
Koreksi nilai aset lainnya non revaluasi	-
Jumlah	1

Koreksi Lain-Lain

Rp178.972

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp178.972 dan Rp1.131.838. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	178.972
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	178.972

Transaksi Antar

Entitas

Rp(1.389.851.072)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(1.389.851.072) dan Rp2.400.924.123. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	33.754.615.604
Diterima dari Entitas Lain	(35.385.689.266)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	241.222.590
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(1.389.851.072)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp(35.385.689.266) sedangkan DKEL sebesar Rp33.754.615.604.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp241.222.590 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Sekretariat DJPT	241.222.590
	Jumlah		241.222.590

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0. Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1		Uang	
2		Barang	
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp179.095.018.412

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp179.095.018.412 dan Rp168.504.765.116.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Pada Tahun 2025 telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 9 kali terkait dengan efisiensi anggaran berdasarkan Perintah Presiden RI serta penyesuaian belanja dan pembukaan pagu blokir.
- b. Terhadap PYMHD atas kapal tidak beroperasi yang menjadi temuan BPK pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 22 sebanyak 54 kapal, terdapat 22 kapal yang tidak diketahui STBLKKnya dikarenakan kapal tersebut masuk kolam pelabuhan sejak operasional Tambat Labuh masih dikelola oleh PT. Perikanan Indonesia (sebelum 15 Oktober 2019) dan telah diperhitungkan potensinya sebesar Rp8.839.203.660,00. Terhadap 22 kapal tersebut diketahui kapal-kapal sudah dalam kondisi rusak/tidak layak melaut dan sudah mangkrak di kolam pelabuhan selama minimal lebih dari 5 tahun dan berpotensi tidak tertagih.